

	News Title : Bappebti Bakal Tetapkan Whitelist Aset Kripto, Ini Tujuannya!	
	Media Name : Sinarharapan.co	Journalist : Yuanita SH
	Publish Date : 29 June 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar), Oscar Darmawan (CEO INDODAX)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : whitelist Aset Kripto

 **Ekonomi**

Bappebti Bakal Tetapkan Whitelist Aset Kripto, Ini Tujuannya!

Yuanita SH

- Sabtu, 29 Juni 2024 | 18:41 WIB





Bappebti Bakal Tetapkan Whitelist Aset Kripto, Ini Tujuannya! (Foto: Sinar Harapan (Copi))

SINAR HARAPAN- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) akan menetapkan **whitelist** (daftar putih) terhadap aset **kripto**.

Langkah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan pasar aset digital yang terus berkembang pesat.

"Dalam upaya memfasilitasi dan mengatur pertumbuhan aset kripto yang berkelanjutan, Bappebti akan menetapkan whitelist terhadap aset kripto," ujar Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Baca Juga:

Waduh! Kali Ini Waskita Karya (WSKT) Digugat Bos Saratoga (SRTO)

Pembuatan whitelist bertujuan melindungi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pedagang, nasabah, dan konsumen, dari risiko kerugian yang mungkin timbul.

Kebijakan ini akan memungkinkan adanya pengawasan yang lebih terstruktur terhadap aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan di Indonesia, memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi kripto.

Langkah ini dilakukan agar ekosistem kripto lebih aman dan kondusif bagi perkembangan aset kripto itu sendiri, serta memberikan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam pasar ini.

Baca Juga:

Raksasa Tekstil Sritex (SRIL) Tumbang Hingga PHK Ribuan Karyawan, Ini Penyebabnya!

Ia menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan whitelist adalah untuk melindungi pedagang, nasabah, dan konsumen dari potensi kerugian.

Terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh aset kripto, seperti sistem kliring real-time dan penyimpanan oleh custodian, sebelum dapat masuk dalam daftar tersebut.

Dengan begitu, ujarnya lagi, diharapkan ekosistem aset kripto dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan dan kestabilan dalam pasar digital.

Baca Juga:

Telkom (TLKM) Dukung Startup Berkontribusi Dalam Pengembangan IKN Nusantara

Saat ini, industri kripto nasional tengah dalam masa transisi dengan adanya perpindahan pengawasan kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal tersebut membuat aset kripto berpotensi dikategorikan sebagai instrumen perdagangan, dan penyelenggara layanan industri kripto diakui sebagai salah satu lembaga keuangan setara dengan bank.

CEO INDODAX Oscar Darmawan menilai bahwa transisi industri kripto tersebut dapat memperluas inklusi keuangan di masyarakat.

“Dalam ekosistem kripto, tidak ada batasan geografis atau minimum saldo untuk memulai investasi. Ini memungkinkan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau bagi sebagian besar masyarakat,” katanya.

Ia menuturkan bahwa transisi tersebut juga berpeluang membawa teknologi blockchain yang kini diterapkan di industri kripto untuk diadopsi di industri perbankan dan pasar modal.

Menurutnya, teknologi blockchain dapat membantu mengurangi biaya operasional dan keamanan yang sangat besar di industri perbankan serta meningkatkan keamanan di industri pasar modal.

“NASDAQ, bursa saham di Amerika Serikat, telah menggunakan blockchain yang terbukti lebih murah, efisien, dan aman,” ujar Oscar.

Ia mengatakan bahwa penggunaan teknologi blockchain juga dapat memberikan jejak digital yang jelas atas aset kripto yang dimiliki investor, sehingga membuat aset kripto sulit digunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

“Transaksi kripto mudah dilacak karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus, walaupun sudah terjadi beberapa tahun lalu. Ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran,” katanya pula.***